



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



APBN KITA

Triwulan 1 dan Kondisi Ekonomi Terkini

kemenkeu.go.id



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KONFERENSI PERS APBNKITA KINERJA DAN FAKTA



Pendapatan Negara

(s.d. 31 Maret 2026)

Rp574,9 T

(18,2% thd APBN)

a.l.

Rp394,8 T
Penerimaan Pajak

Rp67,9 T
Penerimaan
Kepabeanan dan
Cukai

Rp112,1 T
PNBP



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Belanja Negara

(s.d. 31 Maret 2026)

Rp815,0 T
(21,2% thd APBN)

Rp610,3 T
Belanja
Pemerintah Pusat

Rp204,8 T
Transfer ke Daerah



Ekonomi Indonesia Tumbuh Kuat 5,61% (yoy) Triwulan I Tahun 2026

✦ Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)

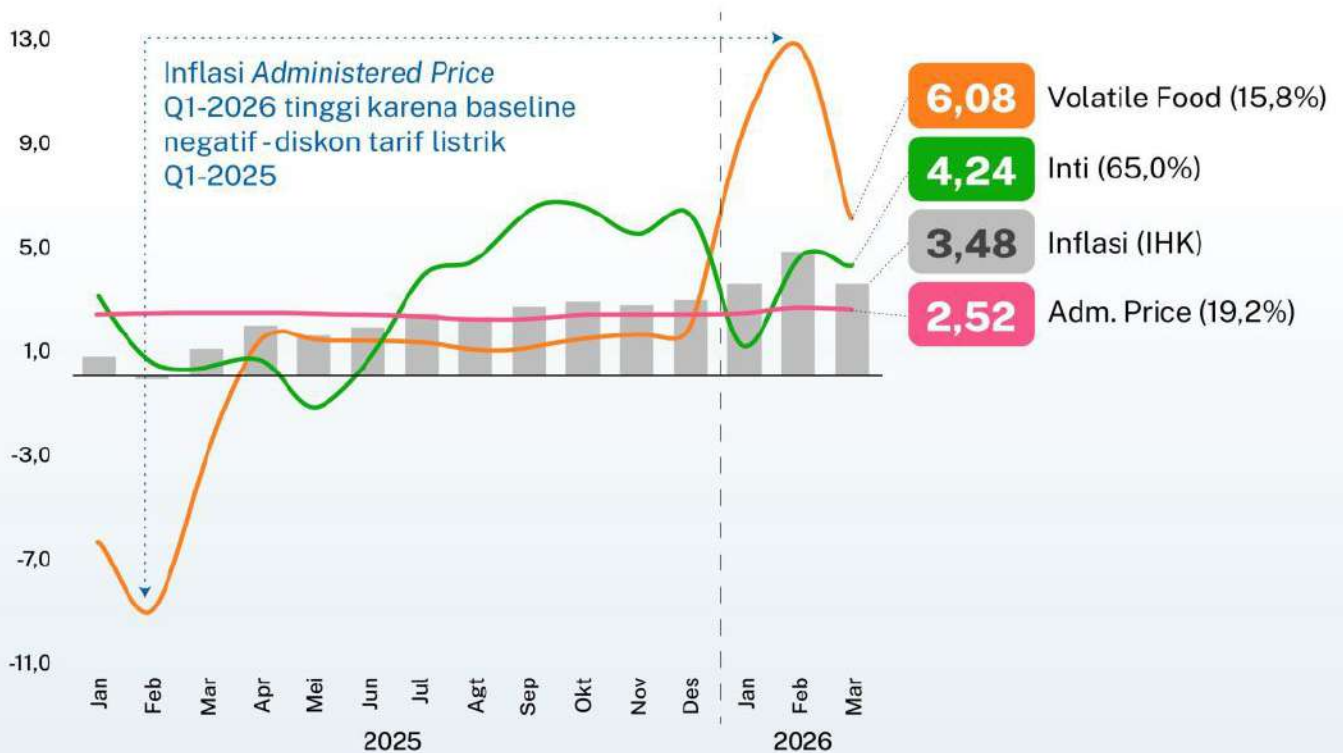


Sumber: BPS

- ✦ Aktivitas ekonomi meningkat seiring dengan percepatan belanja Pemerintah, serta penguatan konsumsi rumah tangga dan investasi.
- ✦ Akselerasi berbagai proyek Danantara turut memperkuat pertumbuhan investasi.
- ✦ Kapasitas produksi di berbagai sektor meningkat guna memenuhi permintaan domestik dan internasional serta mendukung program prioritas Pemerintah.



Inflasi Terkendali, Daya Beli Masyarakat Terjaga



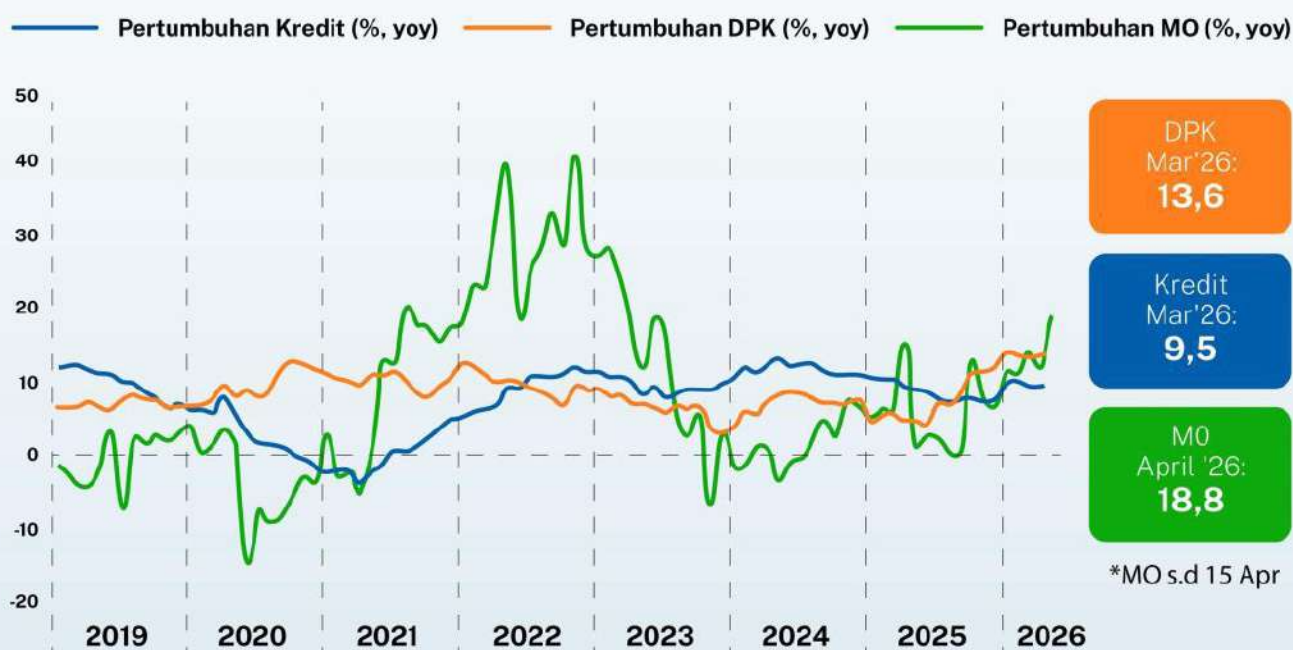
Sumber: BPS

- Pemerintah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun 2026.
- Pemerintah terus mengendalikan harga pangan secara nasional didukung dengan cadangan pangan yang kuat.



Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Terus Diperkuat untuk Pertumbuhan Ekonomi Tinggi & Berkelanjutan

✦ Transmisi Kredit Terus Didorong



Sumber: OJK dan BI

- ✦ Penempatan kas negara turut menurunkan suku bunga deposito dan kredit.
- ✦ Transmisi likuiditas ke sektor riil terus diperkuat bersama Bank Indonesia.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Belanja Pemerintah Terakselerasi, APBN Berperan sebagai *shock absorber* di tengah volatilitas ekonomi global

Per 31 Maret 2026:

- ✦ Belanja Pemerintah Pusat meningkat 47,7% (yoy), dialokasikan untuk bantuan sosial, gaji dan THR, serta subsidi dan kompensasi.
- ✦ Persentase penyaluran TKD juga meningkat mencapai 29,5% dari APBN, termasuk tambahan alokasi TKD bagi daerah terdampak bencana di pulau Sumatra.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



kemenkeu.go.id